

PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023

Adis Natasya Arlini¹

¹Universitas Ngudi Waluyo

Email : natasyaadis30@gmail.com

Abstrak

Pemulihan ekonomi pasca-pandemi menuntut pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan alokasi belanja secara lebih efektif guna mendorong aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel berbasis data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Sampel penelitian terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 175 data selama lima tahun pengamatan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Dana Perimbangan dan Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa dukungan fiskal dari pemerintah pusat serta alokasi belanja pembangunan daerah memainkan peran penting dalam memperkuat kinerja ekonomi regional.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

The post-pandemic economic recovery has required local governments to manage regional revenue sources and expenditure allocations more effectively to support local economic activity. This study aims to analyze the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), Balancing Funds, and Capital Expenditure on economic growth in regencies and cities across Central Java Province during the period 2019–2023. A quantitative approach was employed using panel data analysis based on secondary data obtained from the official website of the Central Java Statistics Bureau. The research sample consists of 29 regencies and 6 cities, resulting in a total of 175 observations over five years. Data were analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS version 25. The findings indicate that PAD does not have a significant effect on economic growth. In contrast, Balancing Funds and Capital Expenditure show a significant positive influence on regional economic growth. These results highlight the essential role of central government fiscal support and the effectiveness of development-oriented regional spending in strengthening local economic performance.

Keywords: *Regional Original Income, Balancing Funds, Capital Expenditure, Economic Growth.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama kemandirian finansial pemerintah daerah. Menurut Mulyadi, (2011) menjelaskan bahwa PAD memegang peranan signifikan sebagai sumber pembiayaan utama bagi berbagai program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. PAD mendukung penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan berbagai agenda pembangunan lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat.

Namun, di Provinsi Jawa Tengah masih ditemukan persoalan pengendapan dana PAD, yakni kondisi ketika sebagian anggaran tidak segera direalisasikan untuk kegiatan pembangunan. Padahal, provinsi ini memiliki capaian PAD yang cukup tinggi, yaitu rata-rata Rp13,9 triliun per tahun selama 2019–2023. Fenomena tersebut menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Subekti, (2025) mencatat bahwa

hingga triwulan III 2025 terdapat dana mengendap sebesar Rp234 triliun di perbankan, menggambarkan rendahnya serapan anggaran serta tantangan dalam percepatan digitalisasi pemerintahan.

Secara regulatif, desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan seperti pajak dan retribusi yang menjadi bagian dari PAD. Namun demikian, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat meliputi DAU, DAK, dan DBH untuk mengurangi disparitas fiskal antarwilayah. Idealnya, dana transfer ini dapat memperkuat kapasitas pembangunan, terutama melalui peningkatan belanja modal. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar-daerah dan koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 1. Penyerapan Pendapatan Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2019	Rp 26.333.746.838.000	Rp 25.986.244.000.000	98,68%
2020	Rp 26.204.164.506.000	Rp 25.393.556.000.000	96,91%
2021	Rp 27.036.122.274.000	Rp 26.635.246.000.000	98,52%
2022	Rp 25.125.002.500.000	Rp 24.168.017.000.000	96,19%
2023	Rp 27.482.744.908.000	Rp 25.369.913.000.000	92,31%

Menurut (Jateng, 2025) Pada 2019, realisasi pendapatan mampu mencapai 98,68 persen dari target yang ditetapkan, namun pada 2020 angka tersebut menurun menjadi 96,91 persen akibat melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi Covid-19. Kondisi sempat membaik pada 2021 dengan capaian 98,52 persen, tetapi kembali mengalami penurunan pada 2022 menjadi 96,19 persen, bahkan turun lebih tajam pada 2023 dengan tingkat penyerapan hanya 92,31 persen. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun nominal pendapatan daerah relatif stabil, efektivitas penyerapan masih menghadapi tantangan, terutama dalam periode pasca pandemi. Rendahnya tingkat penyerapan berpotensi mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga menjadi faktor penting untuk diperhatikan dalam analisis mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Belanja daerah, khususnya belanja modal, berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah terdiri dari belanja langsung (belanja pegawai, barang/jasa, dan modal) serta belanja tidak langsung. Belanja modal

adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk investasi seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap, bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pelayanan publik. Jika dikelola efektif, belanja modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.

Pengeluaran ini umumnya dialokasikan untuk infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, kesehatan, dan pendidikan, yang berkontribusi jangka panjang pada produktivitas ekonomi, konektivitas antarwilayah, penurunan biaya produksi, perluasan akses pasar, serta peningkatan layanan publik. Dengan demikian, belanja modal berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Jayanti, 2018). Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada besar anggaran, melainkan juga pada kualitas perencanaan, transparansi pengadaan, dan pemeliharaan aset. Belanja modal yang tidak sesuai kebutuhan lokal dapat menghasilkan infrastruktur kurang termanfaatkan, sehingga multiplier effect terhadap perekonomian tidak optimal. Keberhasilan bergantung pada penyesuaian investasi dengan potensi dan prioritas daerah (Pasal Bessy & Setiadi, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory) menyediakan kerangka konseptual untuk menganalisis hubungan antara pihak yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agent). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan dinamika antara berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah Pusat dapat dianalogikan sebagai principal bagi Pemerintah Daerah (agent) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah sebagai agent bertanggung jawab mengelola instrumen fiskal daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan mengalokasikannya ke dalam Belanja Modal demi mencapai tujuan principal, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan instrumen fiskal ini bergantung pada kemampuan principal (Pemerintah Pusat dan masyarakat) dalam memberikan insentif yang tepat dan melaksanakan pengawasan efektif guna meminimalisir moral hazard dan konflik kepentingan di tingkat daerah. Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai perwakilan masyarakat (principal) dan pengawas utama bagi Pemerintah Daerah (agent), yang menuntut

tingkat akuntabilitas dan transparansi tinggi dalam setiap keputusan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya menopang terciptanya good governance.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampe Penelitian

Objek penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota selama periode pengamatan 2019 hingga 2023. Dengan menggunakan teknik sensus (sampling jenuh), seluruh populasi daerah tersebut dijadikan sampel, menghasilkan total 175 unit observasi data panel (35 daerah $\times$ 5 tahun).

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder kuantitatif yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Sumber data berasal dari laporan dan publikasi resmi, antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, serta data keuangan daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Seluruh data tersebut diakses melalui situs

resmi seperti bps.jateng.go.id dan portal resmi DJPK.

Definisi Operasional Variabel Independen dan Dependen

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur menggunakan persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan PDRB harga konstan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga perubahan yang terjadi benar-benar mencerminkan pertumbuhan volume produksi barang dan jasa di suatu daerah dari tahun ke tahun (Tahar & Zakhiya, 2011).

Variabel Independen

Variabel independent penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah salah satu komponen utama pendapatan daerah yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri. PAD adalah sumber pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah (UU No 33 Tahun 2004).

Selanjutnya variabel yang kedua pada penelitian ini adalah Dana Perimbangan (X2). Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menurut UU No 33 Tahun 2004 dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Variabel independent selanjutnya adalah Belanja Modal (X3) Adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memperoleh aset tetap, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset berwujud lainnya yang memberikan manfaat jangka Panjang. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja fisik lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	156	200000000000	1695266584100	394265358228.21	159254207680.743
DANA PERIMBANGAN	156	563537121000	2426181466000	1537670105294.87	417212552176.435
BELANJA MODAL	156	130280000000	953670000000	308566506288.46	120495303599.397
PERTUMBUHAN EKONOMI	156	129	1028	436.68	153.886
Valid N (listwise)	156				

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 156 unit penelitian (N), dikarenakan terdapat pengurangan dengan outlier. Data tersebut merupakan kota/kabupaten provinsi Jawa Tengah selama lima tahun dimulai periode 2019-2023. Pada tahun tersebut terdapat 35 kota/kabupaten di Jawa tengah, sehingga jumlah sampelnya menjadi 175 unit, kemudian dilakukan uji outlier dengan mengurangi 19 unit sehingga menjadi 156 unit penelitian.

Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel independen (PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal) dan variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023 menunjukkan variasi signifikan antar daerah, dengan indikasi ketimpangan fiskal dan ekonom sebagai berikut:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah): Nilai minimum Rp 200 miliar (Kabupaten Blora, 2019), maksimum Rp 1.695

triliun (Kota Semarang, 2021). Rata-rata Rp 394 miliar, dengan standar deviasi tinggi (Rp 159 triliun), menunjukkan ketimpangan kemandirian fiskal antar daerah.

2. Dana Perimbangan: Nilai minimum Rp 563 triliun (Kota Magelang, 2020), maksimum Rp 2.426 triliun (Kabupaten Cilacap, 2023). Rata-rata Rp 1.537 triliun, standar deviasi Rp 417 triliun, mengindikasikan pemerataan dana dari pusat yang belum merata, terutama untuk daerah dengan wilayah besar atau kebutuhan kompleks.
3. Belanja Modal: Nilai minimum Rp 130 miliar (Kota Salatiga, 2021), maksimum Rp 953 miliar (Kota Semarang, 2021). Rata-rata Rp 308 miliar, standar deviasi Rp 120 miliar, menunjukkan kapasitas anggaran pembangunan fisik yang terbatas di mayoritas daerah, dengan ketimpangan signifikan dalam kemampuan investasi infrastruktur.
4. Pertumbuhan Ekonomi: Nilai minimum 129 (Kabupaten Batang, 2020), maksimum 1.028 (Kabupaten Cilacap, 2020). Rata-rata 436,68, standar deviasi 153,89, mengindikasikan fluktuasi beragam

antar daerah, dengan perkembangan ekonomi yang tidak merata.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		156
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13726013
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.060
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel dua dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,053. Nilai tersebut lebih besar dari batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.495	2.019
	DANA PERIMBANGAN	.472	2.117
	BELANJA MODAL	.556	1.798

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Nilai

tolerance untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,495, Dana Perimbangan (X2) sebesar 0,472, dan Belanja Modal (X3) sebesar 0,556. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah 2,019, Dana Perimbangan (X2) sebesar 2,117, dan Belanja Modal (X3) sebesar 1,798. Semua nilai VIF ini lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedasitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	341.440	235.285		1.451
	PAD	-7.306E-11	.000	-.030	-.298
	DANA PERIMBANGAN	-1.045E-10	.000	-.054	-.642
	BELANJA MODAL	1.545E-10	.000	.028	.263

a. Dependent Variable: Abs. RES

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser Test. Nilai Signifikansi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,766, Dana Perimbangan sebesar 0,522, Belanja Modal sebesar 0,793. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak mengandung gejala

heteroskedastisitas, sehingga varian residual bersifat homogen.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.044 ^a	.002	-.016	882.229	2.064

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN, PAD
b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

$DU = 1,7877$ $DW = 2,064$ ($4-DU = 2,2123$)

$DU < D < (4-DU) = 1,7877 < 2,064 < 2,2123$

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson Test. Nilai statistik Durbin-Watson yang diperoleh berada di antara batas du dan 4 – du, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926 ^a	.858	.856	.08383

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD, DANA PERIMBANGAN

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

Dari table diatas bisa dikatakan koefisiensi determinasinya 0,856 atau berarti 85,6% sehingga pada pengaruh PAD, Dana Peimbangan, dan Belanja Modal memiliki pengaruh simultan dengan pertumbuhan ekonmi sebesar 85,6% dan

sisanya 14,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	7.281	3	2.427	86.335	.000 ^b
Residual	4.807	171	.028		
Total	12.088	174			

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI
b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD, DANA PERIMBANGAN

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

Pada table diatas menunjukan bahwa signya 0.000 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga diartikan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 9. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	16.355	.674		24.276
	PAD	-.037	.033	-.082	-1.096
	DANA PERIMBANGAN	-.091	.039	-.190	-2.352
	BELANJA MODAL	-.260	.037	-.558	-7.061

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

Hasil pada Tabel diatas digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jika nilai signifikansi (sig t) lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis dinyatakan diterima. Sebaliknya, jika nilai sig t lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai PAD yang dilihat dari signifikannya 0,275 lebih besar dari 0,05 maka bisa dikatakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau **hipotesis ditolak**.
2. Nilai Dana Perimbangan yang dilihat dari signifikannya 0,20 lebih kecil dari 0,05 maka bisa dikatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau **hipotesis diterima**.
3. Nilai Belanja Modal yang dilihat dari signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka bisa dikatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi atau bisa dikatakan **hipotesis diterima**.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
	B	Std. Error		Beta	t	Sig.
1						
(Constant)	5.147	3.964			1.298	.196
PAD	.109	.128		.075	.851	.396
DANA	.165	.158		.097	1.049	.296
PERIMBANGAN						
BELANJA MODAL	.254	.134		-.182	-1.897	.060

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber: Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 25

Persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi = $5.147 + 0,109X_1 + 0,165X_2 +$

$0,254X_3 + e$, arti dari persamaan tersebut adalah:

1. Nilai $a = 5.147$ merupakan konstanta atau intercept. Nilai ini menunjukkan perkiraan pertumbuhan ekonomi ketika seluruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) bernilai nol. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada angka 5.147% (secara hipotetis, sesuai konteks data).
2. Nilai $b_1 = 0.109$ adalah koefisien untuk variabel X_1 . Artinya, jika variabel X_2 dan X_3 tetap, setiap kenaikan satu unit pada PAD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.109 unit.
3. Nilai $b_2 = 0.165$ adalah koefisien untuk variabel X_2 . Dengan asumsi variabel lainnya konstan, setiap kenaikan satu unit pada Dana Perimbangan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.165 unit.
4. Nilai $b_3 = 0.254$ adalah koefisien untuk variabel X_3 . Jika X_1 dan X_2 tidak berubah, peningkatan satu unit pada Belanja Modal akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.254 unit.

5. Nilai e adalah error term atau residual, yaitu bagian variasi pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model. Error ini mencerminkan faktor-faktor lain di luar model dan dalam regresi OLS diasumsikan memiliki rata-rata nol serta berdistribusi normal.

Pembahasan

1. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, dengan nilai signifikansi 0,275 yang melebihi batas 0,05, meskipun teori agensi mengharapkan optimalisasi PAD oleh pemerintah daerah sebagai agent untuk mendorong produktivitas melalui belanja modal. Dalam praktik, alokasi PAD sering kali terpengaruh oleh insentif kurang produktif, proyek kepentingan sempit, atau risiko moral hazard seperti korupsi, sehingga dampaknya

tidak sesuai harapan principal. Faktor penyebabnya meliputi struktur PAD yang kecil dan terkonsentrasi, ketergantungan tinggi pada transfer pusat seperti dana perimbangan, DAU, dan DAK, volatilitas penerimaan dari retribusi dan pajak tertentu, serta alokasi belanja yang tidak optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anthony & Rohman, (2024); Imaratul, (2024); Syam et al., (2018); dan Sinaga et al., (2023), yang menyatakan PAD belum menjadi pendorong signifikan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, dengan nilai signifikansi 0,02 yang lebih kecil dari batas 0,05, sejalan dengan teori agensi di mana pemerintah pusat sebagai principal menggunakan dana ini untuk memastikan distribusi sumber daya sesuai prioritas nasional, mengarahkan pemerintah daerah

sebagai agent pada program strategis seperti pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas dan investasi. Dana Perimbangan, yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH, berperan penting dalam membiayai infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, yang meningkatkan pelayanan publik, produktivitas, dan daya tarik investasi; DAU berkontribusi 20–30% terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik (Nugroho, 2020), DAK fisik mempercepat pembangunan infrastruktur yang menurunkan biaya logistik dan menciptakan multiplier effect melalui penciptaan lapangan kerja, sedangkan DBH memberikan kepastian anggaran untuk program padat karya dan layanan publik yang mendorong aktivitas produksi dan output ekonomi. Temuan ini didukung oleh penelitian Ayu, (2018); Kurniawan & Arifin, (2024); Simanjuntak, (2024); serta Nany & Suryarini, (2022) yang menyatakan bahwa komponen dana perimbangan tersebut berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah.

3. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, dengan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari batas 0,05, karena belanja modal berperan strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan investasi produktif yang meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi swasta. Secara spesifik, belanja modal pada infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan menurunkan biaya distribusi dan membuat daerah lebih menarik bagi investasi; investasi pada gedung sekolah, puskesmas, dan fasilitas kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melahirkan tenaga kerja terampil dan mengurangi kehilangan produktivitas; sedangkan di sektor pertanian, belanja pada irigasi dan mesin pertanian mengurangi volatilitas produksi dan

meningkatkan pendapatan petani. Secara keseluruhan, belanja modal ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan penelitian Rahmawati, (2024); Alifah et al., (2023); Gosal et al., (2022); serta Surtika Yanti, Luluk Fadliyanti, (2021) yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Uji F menghasilkan nilai signifikansi 0,000 yang berada jauh di bawah batas 0,05, sementara nilai R Square sebesar 85,6% menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini menegaskan bahwa

ketiga sumber pendanaan daerah berperan penting dalam memperkuat pembangunan melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan perluasan aktivitas investasi. Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas pendanaan yang diarahkan secara proporsional pada belanja produktif terbukti memberikan dorongan lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan apabila masing-masing variabel meningkat secara terpisah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji bagaimana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019–2023 dipengaruhi oleh tiga komponen utama pendapatan dan pengeluaran daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Ketiga variabel tersebut merangkum kapasitas fiskal daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan aktivitas ekonomi regional dan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023.

2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023.
3. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, T., Pravasanti, Y. A., & Kusuma, I. L. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Alokasi Anggaran Belanja Modal Di Kabupaten Se-Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 412–419. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i3.65>
- Anthony, A. R., & Rohman, A. (2024). PENGARUH PENINGKATAN PAD DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2), 1–12. [http://ejournal-](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting)

[s1.undip.ac.id/index.php/accounting](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting)
Ayu, P. P. (2018). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan dan Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 3(1), 80–96.

Gosal, J. S., Lutherani, A., Lopian, C. P., & Masloman, I. (2022). PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG DAN JASA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO TAHUN 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah*, 22(5), 85–96.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>

<https://jateng.bps.go.id/>

Imaratul, U. (2024). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi*. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37532>

- Jateng, B. (2025). *Badan Pusat Statistik PROVINSI JAWA TENGAH*.
<https://jateng.bps.go.id/id>
- Jayanti, fitri dwi. (2018). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA ALOKASI UMUM , DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2016-2018 THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME , GENERAL ALLOCATION FUNDS , AND SPECIFIC ALLOCATION FUN*. 8(3), 335–341.
- Kurniawan, D. S., & Arifin, A. (2024). Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Aloksi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating di Jawa Tengah Tahun 2019-2021. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1835–1849.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.6077>
- Mulyadi, S. (2011). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad) terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah (suatu studi di kabupaten kepulauan sula). *Jurnal GOVERNANCE*.
- Nany, M., & Suryarini, T. (2022). *Does balancing fund affect economic growth and poverty level in central java?* 6(1), 1–24.
- Nugroho, M. A. (2020). Studi Kinerja Bank Pembangunan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi*.
- Pasal Bessy, A. D., & Setiadi, P. B. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Serta Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), 1216–1227.
<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.270>
- Rahmawati, M. (2024). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER KE DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023*. *Jurbnal Ekonomi*.
<https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38553>

- Simanjuntak, D. P. (2024). *THE INFLUENCE OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GRDP), LOCAL OWN- SOURCE REVENUE (PAD) AND BALANCE FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION IN ALL PROVINCIAL GOVERNMENTS IN INDONESIA IN 2019-2021*. 23–32.
- Sinaga, M., Zalukhu, R. S., Collyn, D., Piter, R., & Hutaeruk, S. (2023). *Pengaruh PAD , dana perimbangan , dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di kepulauan Nias : mediasi belanja modal*. 9(2), 1070–1081.
- Subekti, R. (2025). Ekonom Ungkap Akar Masalah Dana Pemda Mengendap Rp 234 Triliun di Bank. *Dkatadata*. https://katadata.co.id/finansial/makro/68fa0b42f40c0/ekonom-ungkap-akar-masalah-dana-pemda-mengendap-rp-234-triliun-di-bank?utm_source=chatgpt.com
- Surtika Yanti, Luluk Fadliyanti, A. M. (2021). *Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN Dan Investasi PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB*. *Ekonomi*, 7(1), 18–39.
- Syam, A. Y., Rizani, F., & Oikawa, S. (2018). *Influence of PAD and DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable on Regency and Municipal Government in South Kalimantan Province*. 1–9.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.